

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai Upah Minimum Propinsi pada PT. Anindya Mitra Internasional belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut nampak terlihat dari prosentase komponen upah minimum propinsi yang seharusnya komponen upah pokok sebesar 75% dari upah minimum propinsi dan tunjangan tetap 25% dari upah minimum propinsi, namun kenyataannya dalam pelaksanaan pengupahan pekerja di PT. Anindya Mitra Internasional masih dibawah UMP DIY dimana dalam perusahaan tersebut untuk staff menerima Upah pokok sebesar Rp 244.971,00, dengan demikian hanya 30,3 % dari UMP DIY, untuk security dan OB memperoleh upah pokok Rp 214.971,00, dengan demikian hanya 26,6%. Untuk tunjangan tetap staff sebesar Rp 176.129,00 yang hanya 21,8% dari UMP DIY dan tunjangan tetap security dan OB sebesar Rp 154.129,00 yang hanya mencakup 19,1% dari UMP DIY.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa PT Anindya Mitra Internasional harus mengupayakan upah bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, dan dalam masa percobaan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang terdiri dari 75% gaji

pokok dan 25% tunjangan tetap sehingga kesejahteraan pekerja lebih terjamin, yaitu dengan meningkatkan upah pokok kepada staf sebesar 44,9% atau bekisar Rp 361.029,00 dan tunjangan tetap sebesar 3,2 atau bekisar Rp.25.856,00, sedangkan untuk OB dan security, perusahaan harus meningkatkan upah pokoknya 48,4% atau bekisar Rp 391.072,00 dan tunjangan tetap 5,9% atau bekisar Rp 47.672,00, dengan demikian tunjangan tidak tetap bisa diberikan diluar UMP, dan bisa jelas dilihat upah yang akan diterima pekerja bisa melebihi UMP DIY.

2. PT Anindya Mitra Internasional harus melakukan penangguhan kepada Disnakertrans dengan mengutarakan keadaan perusahaan secara jujur, sehingga Disnakertrans bisa memberi ijin kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan penangguhan. Dengan demikian PT Anindya Mitra Internasional bisa diawasi pelaksanaan mengenai upahnya oleh Disnakertrans sehingga diharapkan pekerja tidak terus menerus dirugikan dengan perubahan upah yang lebih baik setelah masa penangguhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rachmad Budiono, 2009, "*Hukum Perburuhan*", PT indeks, Jakarta
- Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2001, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka cipta, Jakarta
- Djoko Triyanto, 2004, "*Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*", Mandar Maju, Bandung
- Djumialdji, F.X, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartasapoetra, G, 1986, "*Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*", PT. Bina Aksara, Jakarta
- Lalu Husni, 2006, M.Hum, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prof. Imam Soepomo, 1992, "*Pengantar Hukum Perburuhan*", PT. Ikrar Mandiriaba, Jakarta
- Prof. Roekmono Markam, 1981, *Masalah Pengupahan Dalam Hubungan Perburuhan*, Liberty Offset, Yogyakarta
- Ridwan Halim, A, 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta
- Sendjun Manulang, H, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Penetapan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/MEN/1999 tentang upah minimum

Keputusan Gubernur DIY No. 270/KEP/2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi

Pasal 1 KEPMEN No. 100/MEN/IV/2004 tentang perjanjian kerja waktu tertentu

Website:

<http://duniapajak.com>

www.wikimu.com

www.kompas.com

<http://adhipranoto.wordpress.com>

<http://www.bisnis-jateng.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional

<http://indosdm.com/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-1981-perlindungan-upah>

